



RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui satuan perangkat daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas dan fungsi. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Melalui Penetapan Renja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintahan maupun swasta yang membutuhkannya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Telukdalam, 29 Juli 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Nias Selatan,



AFERILI HARITA, SE., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 200502 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	38
 Bab III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD 2022	
3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	40
 Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan	42
 Bab V Penutup	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana OPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja Menjembatani Sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penetapan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Dearah Kabupaten Nias Selatan;
13. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor __ Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
15. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor __ tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Renja-PD Kabupten Nias Selatan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKPAD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKPAD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Terdapat 15 (lima belas) landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 BPKPAD Kabupaten Nias Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 terdapat 5 (lima) poin.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dengan mengikuti aturan penulisan yang telah ditetapkan pada Permendagri No 86 Tahun 2017.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada dasarnya analisis kinerja dilaksanakan untuk mengetahui efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran. Berikut disajikan analisis terhadap masing-masing sasaran tahun 2025.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja , OPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan menghadapi beberapa kendala yang disisi lain juga menjadi tantangan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 disajikan dalam bentuk table 2.4.

2.5. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Terkait tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Nias Selatan maka usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak tersedia dalam Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Untuk mendukung prioritas arah kebijakan RKP tahun 2025 BPKPAD akan memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah untuk mendukung suksesnya RKP RI tahun 2025.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Sasaran utama jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan maka harus ditetapkan indikator – indikator sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran utama BPKPAD untuk tahun 2025.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari beberapa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung tercapainya peran fungsi dan tujuan Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan BPKPAD terdiri dari 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan.

Bab V Penutup

Dengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD.

Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Nama PD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Su b Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Su b Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat at Capai an Reali sasi Targe t Renst ra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(1 0/4)
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5 2 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10		2	2	100%	2	4	40%
2 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5		1	1	100%	1	2	40%

5	2	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	175	Unit				12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	24	Unit	14%
5	2	1	9	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit				1	Unit	1	Unit	100%	2	Unit	2	Unit	40%
5	2	2	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan yang Baik dan Berkualitas	100	%				100	%	85	%	85%	100	%	100	%	100%
5	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	100	%				100	%	78	%	78%	100	%	100	%	100%
5	2	2	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dok				3	Dok	3	Dok	100%	3	Dok	6	Dok	60%
5	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	Dok				3	Dok	3	Dok	100%	3	Dok	6	Dok	60%
5	2	2	1	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	10	Dok				3	Dok	3	Dok	100%	3	Dok	6	Dok	60%
5	2	2	1	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	10	Dok				3	Dok	3	Dok	100%	3	Dok	6	Dok	60%
5	2	2	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	10	Dok				3	Dok	0	Dok	0%	3	Dok	3	Dok	30%
5	2	2	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	10	Dok				3	Dok	0	Dok	0%	3	Dok	3	Dok	30%
5	2	2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	10	Dok				4	Dok	4	Dok	100%	4	Dok	8	Dok	80%

5	2	2	2	3	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	315	Dok		12	Dok	0	Dok	0%	12	Dok	12	Dok	4%
5	2	2	2	3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60	Laporan		12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	24	Laporan	40%
5	2	2	2	3	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	315	Laporan		12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	24	Laporan	8%
5	2	2	2	3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	20	Dok		4	Dok	4	Dok	100%	4	Dok	8	Dok	40%
5	2	2	2	3	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	Dok		2	Dok	0	Dok	0%	2	Dok	2	Dok	20%
5	2	2	2	3	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	60	Dok		12	Dok	12	Dok	100%	12	Dok	24	Dok	40%

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

BARANG MILIK DAERAH				yang Baik															
5	2	3	1	2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	100	%											
5	2	3	1	2.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10	Dok											
5	2	3	1	2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	60	Laporan											
5	2	3	1	2.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	60	Laporan											
5	2	3	1	2.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	60	Laporan											
5	2	3	1	2.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	60	Laporan											
5	2	3	1	2.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60	Laporan											
5	2	3	1	2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%											
5	2	4	1	2.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	100	%											
5	2	4	1	2.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	Dok											
5	2	4	1	2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	10	Dok											

5	2	4	1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	Dok		12	Dok	12	Dok	100%	12	Dok	24	Dok	40%
5	2	4	1	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20	Dok		12	Dok	12	Dok	100%	12	Dok	24	Dok	120%
5	2	4	1	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20	Dok		12	Dok	12	Dok	100%	12	Dok	24	Dok	120%

Indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu program, kegiatan, serta sub kegiatan yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator kinerja dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2023, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 100% sesuai dengan target Renja BPKPAD Kabupaten Nias Selatan sebesar 100%, ini merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember), dan diharapkan untuk Tahun 2024 realisasi pencapaian dapat tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada dasarnya analisis kinerja dilaksanakan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran. Berikut disajikan analisis terhadap masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD - BPKPAD
Kabupaten Nias Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WDP	WDP	WTP	WTP	WDP		WTP	WTP		
2	Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
3	Penyusunan struktur anggaran yang berimbang			0	0	0	0	0%	0%	0	0		
4	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
5	Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
6	Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya			4%	8%	12%	16%	-	-	12%	16%		
7	Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)			30%	45%	60%	75%	35%	35%	60%	75%		
8	Persentase PAD terhadap APBD			3.41 %	3.42 %	3.47 %	3.48 %	2.81%	2.14%	3.47 %	3.48 %		

Indikator Kinerja 1:

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan berupaya semaksimal mungkin agar selalu tertib administrasi dan selalu menghimbau seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan pelaksanaan realisasi anggaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan kementerian-kementerian terkait, dimana pada T.A. 2022 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Nias Selatan adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tercapainya target opini WTP untuk Laporan Keuangan Kabupaten Nias Selatan TA.2022 berkat upaya dan komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh perangkat daerah/stakeholder yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dengan melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD dari target WDP untuk Tahun 2022.

Demikian untuk hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah T.A. 2023 masih belum dapat disajikan dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara hingga dokumen LAKIP ini diselesaikan. Maka BPKPAD tidak dapat menyajikan realisasi dari target opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada dokumen ini dimana target opini BPK pada RPJMD adalah WDP untuk Tahun 2023 dan tidak menutup kemungkinan untuk mencapai kembali target WTP seperti pada tahun 2022.

Indikator Kinerja 2:

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlaksana tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPKPAD T.A. 2023, dimana proses ini dilaksanakan dimulai saat ditetapkannya KUA-PPAS hingga pada penetapan APBD dan dilanjutkan pada penyusunan RKA dan DPA, dan begitu juga proses pelaksanaan pada penyusunan PAPBD, dan semua proses ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama oleh TAPD untuk mendukung percepatan penetapan APBD Kabupaten Nias Selatan T.A. 2023 yang berkualitas dan tepat guna, tepat sasaran.

Indikator Kinerja 3:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2023 telah dimaksimalkan, dalam penyusunan struktur anggaran untuk mencapai penyusunan anggaran yang berimbang dimana pagu Anggaran Pendapatan pada pergeseran setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.551.224.877.904,- mampu memenuhi kebutuhan pagu Anggaran Belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.619.975.653.775,- dengan nilai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 73.250.775.871,- dan Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.500.000.000,- sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenan sebesar Rp. 0,-, dengan demikian target yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja telah tercapai.

Indikator Kinerja 4:

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Indeks Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu BPKPAD telah mengambil Langkah-langkah percepatan dan strategis untuk menghimpun seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara real-time sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan Tepat Waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja 5:

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan khususnya aset daerah maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan penggunaan perangkat lunak yaitu Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Dimana bekerjasama dengan BPKP – RI Perwakilan Sumatera Utara sehingga dapat menghasilkan dan mendukung penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik di Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja 6:

Dalam hal target kinerja pada indikator Kinerja Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya yang capaiannya adalah nol dikarenakan masih belum ditemukan keberadaannya dan asset tersebut sudah

bernilai nol akan tetapi asset tersebut dicatat dalam kelompok asset lain-lain dalam laporan keuangan yang rencananya akan dilakukan pengusulan untuk penghapusan asset sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indikator Kinerja 7:

Salah satu Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan ialah Presentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Bersertifikat, dari Indikator ini telah ditargetkan 45% tanah tersertifikat selama tahun 2023. akan tetapi tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya, yaitu sulitnya para petugas dilapangan untuk memetakan lahan yang sebagian telah diklaim / dikuasai oleh masyarakat, terjadinya banyak keberatan dan perlawanan dari beberapa oknum masyarakat yang merasa memiliki tanah Pemerintah. Dari beberapa kendala diatas dapat disimpulkan bahwa masih perlunya Upaya Pemerintah Daerah untuk mempertegas regulasi-regulasi yang ada, sehingga masyarakat dapat mengerti dan taat aturan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja 8:

Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,52% dengan nilai Rp. 37.950.183.833,77 (unaudited) dari total keseluruhan Pendapatan Daerah dengan nilai Rp. 1.542.841.542.499,77 (unaudited), dimana untuk target persentase PAD terhadap APBD berdasarkan target pada RPJMD sebesar 3.42% tidak tercapai, namun perlu diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan pada APBD dimana target PAD pada APBD sebesar Rp. 34.654.217.080,94 dan capaian realisasi sebesar 37.950.183.833,77 sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 melebihi target dari target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2023.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagai wakil Pemerintah Kabupaten, Bupati melalui OPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas dalam pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menunjang kelancaran dan peningkatan kinerja Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja, OPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan menghadapi beberapa kendala yang disisi lain juga menjadi tantangan yaitu:

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan daerah sesuai regulasi dibidang pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal, terkait akan dilimpahkannya kewenangan PBB menjadi pajak daerah. Hal ini tentunya memerlukan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai ditunjang dengan personil SDM yang handal.
3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah.
4. Pengkajian RAPBD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang akuntabel.
5. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan aset daerah Sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
6. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.
7. Meningkatkan partisipasi wajib pajak dan wajib retribusi dalam penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

Nama PD: BPKPAD		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPAD	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	200.447.927.891,20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPAD	Manajemen yang Baik untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.447.927.891,20		
5 2 1 1	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 %	52.500.000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	52.500.000		
5 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	7.500.000		
5 2 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7.500.000		

5	2	1	2	3	1	BPKP AD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPK PAD	Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	7.500.000
5	2	1	2	4	1	BPKP AD	Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPK PAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	7.500.000
5	2	1	2	5	1	BPKP AD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPK PAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	7.500.000
5	2	1	2	6	1	BPKP AD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPK PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	7.500.000
5	2	1	2	7	1	BPKP AD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPK PAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	7.500.000
5	2	1	2	2	2	BPKP AD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	192.969.297.802,20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPK PAD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	192.969.297.802,20
5	2	1	2	1	2	BPKP AD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4000	Ora ng/ Bln	192.941.297.802,20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPK PAD	Jumlah aparat yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	4000	Ora ng/ Bln	192.941.297.802,20
5	2	1	2	3	2	BPKP AD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	756	Dok	7.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPK PAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	756	Dok	7.000.000

5	2	2	1	2	9	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKP AD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	95.000.000		
5	2	2	2	2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKP AD	Pengelolaan Keuangan yang Baik dan Berkualitas	100	%	491.265.777.791		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKP AD	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	100	%	998.784.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKP AD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dok	46.818.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKP AD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dok	46.818.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKP AD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	Dok	15.606.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKP AD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	Dok	15.606.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKP AD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2	Dok	15.606.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKP AD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2	Dok	15.606.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKP AD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dok	405.756.000		
5	2	2	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKP AD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dok	405.756.000		

5	2	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dok	62.424.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPK PAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dok	62.424.000
5	2	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKP AD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyeteroran Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	36.414.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPK PAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	36.414.000
5	2	2	2	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dok	93.636.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPK PAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dok	93.636.000

5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKP AD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	98.838.000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PAD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	98.838.000	12	Laporan	98.838.000
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKP AD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	63	Laporan	119.646.000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PAD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	119.646.000	63	Laporan	119.646.000
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKP AD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4	Dok	327.726.000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PAD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	327.726.000	4	Dok	327.726.000
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKP AD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	Dok	36.414.000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PAD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	36.414.000	2	Dok	36.414.000
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKP AD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Dok	207.334.111	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PAD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	207.334.111	12	Dok	207.334.111
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKP AD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	Dok	31.212.000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PAD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	31.212.000	2	Dok	31.212.000
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKP AD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	%	488.572.4	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPK PAD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	488.572.4	100	%	488.572.4

	4	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan	07.880	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan	7.880		
5 2 2 4	2 8 4	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKP AD	12	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPK PAD	12	Laporan	485.054.553.200
5 2 2 4	2 9 4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKP AD	12	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPK PAD	12	Laporan	2.500.000.000
5 2 2 4	2 0 4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKP AD	12	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPK PAD	12	Laporan	1.017.854.680
5 2 2 5	2 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKP AD	100 %	Tersedianya Data dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	BPK PAD	100 %		104.040.000
5 2 2 5	2 5	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKP AD	4	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPK PAD	4	Dok	67.626.000
5 2 2 5	2 3 5	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BPKP AD	126	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BPK PAD	126	Orang	36.414.000
5 2 3	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKP AD	100 %	Manajemen / Pengelolaan BMD yang Baik	BPK PAD	100 %		2.000.000.000
5 2 3 1	2 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKP AD	100 %	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	BPK PAD	100 %		2.000.000.000
5 2 3 1	2 1	Penyusunan Standar Harga	BPKP AD	2	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPK PAD	2	Dok	275.000.000

5	2	3	1	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKP AD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	355.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPK PAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	355.000.000
5	2	3	1	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKP AD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	299.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPK PAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	299.000.000
5	2	3	1	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	465.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPK PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	465.000.000
5	2	3	1	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKP AD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	238.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BPK PAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	238.000.000
5	2	3	1	2	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKP AD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	368.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPK PAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	Lap ora n	368.000.000
5	2	4		2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKP AD	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	1.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPK PAD	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	1.000.000.000
5	2	4	1	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BPKP AD	Meningkatnya Pendapatan Daerah	100	%	1.000.000.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BPK PAD	Meningkatnya Pendapatan Daerah	100	%	1.000.000.000
5	2	4	1	2	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPKP AD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dok	57.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPK PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dok	57.000.000
5	2	4	1	2	1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BPKP AD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dok	65.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BPK PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dok	65.000.000
5	2	4	1	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKP AD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Lap ora n	175.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPK PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Lap ora n	175.000.000

	TOTAL	Rp 694.713.7 05.682,20	TOTAL	Rp 694.713.70 5.682,20
--	-------	------------------------------	-------	------------------------------

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Penatausahaan Barang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Terkait tugas dan fungsi BPKPAD maka usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak tersedia dalam Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan. Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan, Arah kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024 yang terdiri dari 8 (delapan) arah kebijakan yaitu, Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan

Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan, Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing Usaha, Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas, Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara maka untuk mendukung prioritas arah kebijakan RKP tahun 2025 BPKPAD akan memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah untuk mendukung suksesnya RKP RI tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu : “Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik”.

b. Sasaran

Sasaran utama jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan maka harus ditetapkan indikator – indikator sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran utama BPKPAD untuk tahun 2025 yang terdiri dari Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan yang ditargetkan mendapatkan opini WTP, Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD harus tepat waktu, Penyusunan struktur anggaran yang berimbang dengan target nol rupiah, Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu, tersedianya Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah, Peningkatan Persentase

penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya, Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung) dan Peningkatan Persentase PAD terhadap APBD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari beberapa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung tercapainya peran fungsi dan tujuan Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan BPKPD terdiri dari 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Nias Selatan

BPKPAD														
KODE		URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	2	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
URUSAN	BIDANG URUSAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		
5	2	1			3	4	5	6	7	8	9	10		
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan		BPKPAD	100	%		DAU	PN4 PN7	100	%	200.447.927.891,20
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										

5	2	1	2.	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	BPKPA D	100	%	52.500.000	DAU	100	%	52.500.000
5	2	1	2.	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPA D	2	Dok	7.500.000	DAU	2	Dok	7.500.000
5	2	1	2.	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPA D	1	Dok	7.500.000	DAU	1	Dok	7.500.000
5	2	1	2.	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPA D	1	Dok	7.500.000	DAU	1	Dok	7.500.000
5	2	1	2.	1	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPKPA D	1	Dok	7.500.000	DAU	1	Dok	7.500.000
5	2	1	2.	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPKPA D	1	Dok	7.500.000	DAU	1	Dok	7.500.000
5	2	1	2.	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	BPKPA D	1	Laporan	7.500.000	DAU	1	Laporan	7.500.000

5	2	2	1	2.	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPA D	12	Laporan	20.000.000	DAU		12	Laporan	20.000.000
5	2	2	1	2.	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKPA D	12	Laporan	4.350.000.000	DAU		12	Laporan	4.350.000.000
5	2	2	1	2.	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKPA D	12	Laporan	855.000.000	DAU		12	Laporan	855.000.000
5	2	2	1	2.	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	BPKPA D	100	%	280.000.000	DAU		100	%	280.000.000
5	2	2	1	2.	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKPA D	35	Unit	185.000.000	DAU		35	Unit	185.000.000
5	2	2	1	2.	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKPA D	1	Unit	95.000.000	DAU		1	Unit	95.000.000
5	2	2	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan yang Baik dan Berkualitas	BPKPA D	100	%	491.265.777.791	DAU	PN4 PN7	100	%	491.265.777.791
5	2	2	2	2.	2	1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	BPKPA D	100	%	998.784.000	DAU		100	%	998.784.000
5	2	2	2	2.	2	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKPA D	2	Dok	46.818.000	DAU		2	Dok	46.818.000

5	2	2	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPA D	12	Dok	202.878.000	DAU	SDG's	12	Dok	202.878.000
5	2	2	2	2	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKPA D	2	Laporan	11.964.600	DAU	SDG's	2	Laporan	11.964.600
5	2	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPA D	252	Dok	16.126.200	DAU	SDG's	252	Dok	16.126.200
5	2	2	2	2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKPA D	12	Dok	15.606.000	DAU	SDG's	12	Dok	15.606.000
5	2	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPA D	12	Dok	161.262.000	DAU	SDG's	12	Dok	161.262.000
5	2	2	2	2	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPA D	12	Dok	62.424.000	DAU	SDG's	12	Dok	62.424.000

5	2	2	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPA D	12	Laporan	36.414.000	DAU	SDG's	12	Laporan	36.414.000
5	2	2	2	2	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKPA D	12	Dok	93.636.000	DAU	SDG's	12	Dok	93.636.000
5	2	2	2	2	2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPA D	12	Dok	5.202.000	DAU	SDG's	12	Dok	5.202.000

5	2	2	2	2	2	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	2	Dok	6.762.600	DAU	SDG's	2	Dok	6.762.600
5	2	2	2	2	2	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	189	Orang	36.414.000	DAU	SDG's	189	Orang	36.414.000
5	2	2	2	2	2	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	BPKPD	100	%	941.856.511	DAU		100	%	941.856.511
5	2	2	2	2	2	3	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	12	laporan	67.626.000	DAU	SDG's	12	laporan	67.626.000
5	2	2	2	2	2	3	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKPD	63	Dok	53.060.400	DAU	SDG's	63	Dok	53.060.400
5	2	2	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPD	12	Laporan	98.838.000	DAU	SDG's	12	Laporan	98.838.000

5	2	2	2	2	2	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKPA D	63	Laporan	119.646.000	DAU	SDG's	63	Laporan	119.646.000
5	2	2	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPA D	4	Dok	327.726.000	DAU	SDG's	4	Dok	327.726.000
5	2	2	2	2	2	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPA D	2	Dok	36.414.000	DAU	SDG's	2	Dok	36.414.000
5	2	2	2	2	2	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPA D	12	Dok	207.334.111	DAU	SDG's	12	Dok	207.334.111
5	2	2	2	2	2	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPA D	2	Dok	31.212.000	DAU	SDG's	2	Dok	31.212.000
5	2	2	2	2	2	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Keuangan	BPKPA D	100	%	488.572.407.880	DAU		100	%	488.572.407.880

5	2	2	2	2	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPA D	12	Laporan	485.054.553.200	DAU	SDG's	12	Laporan	485.054.553.200
5	2	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPA D	12	Laporan	2.500.000.000	DAU	SDG's	12	Laporan	2.500.000.000
5	2	2	2	2	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPA D	12	Laporan	1.017.854.680	DAU	SDG's	12	Laporan	1.017.854.680
5	2	2	2	2	5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Data dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	BPKPA D	100	%	104.040.000	DAU	PN 7	100	%	104.040.000
5	2	2	2	2	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKPA D	4	Dok	67.626.000	DAU	SDG's	4	Dok	67.626.000
5	2	2	2	2	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPA D	126	Orang	36.414.000	DAU	SDG's	126	Orang	36.414.000
5	2	3	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen / Pengelolaan BMD yang Baik	BPKPA D	100	%	2.000.000.000	DAU	PN 7	100	%	2.000.000.000
5	2	3	3	3	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	BPKPA D	100	%	2.000.000.000	DAU		100	%	2.000.000.000
5	2	3	3	3	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKPA D	2	Dok	275.000.000	DAU		2	Dok	275.000.000
5	2	3	3	3	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPA D	12	Laporan	355.000.000	DAU	SDG's	12	Laporan	355.000.000

5	2	3	2.	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKPA D	12	Laporan	299.000.000	DAU	SDG's	12	Laporan	299.000.000
5	2	3	2.	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPA D	12	Laporan	465.000.000	DAU	SDG's	12	Laporan	465.000.000
5	2	3	2.	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKPA D	12	Laporan	238.000.000	DAU	SDG's	12	Laporan	238.000.000
5	2	3	2.	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPA D	12	Laporan	368.000.000	DAU	SDG's	12	Laporan	368.000.000
5	2	4	.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPA D	100	%	1.000.000.000	DAU		100	%	1.000.000.000
5	2	4	2.		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	BPKPA D	100	%	1.000.000.000	DAU		100	%	1.000.000.000
5	2	4	2.	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPA D	2	Dok	57.000.000	DAU	SDG's	2	Dok	57.000.000
5	2	4	2.	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPA D	2	Dok	65.000.000	DAU	SDG's	2	Dok	65.000.000
5	2	4	2.	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPA D	12	Laporan	175.000.000	DAU	SDG's	12	Laporan	175.000.000

5	2	4	2.	4	1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPA D	1	Unit	65.000.000	DAU	SDG's	1	Unit	65.000.000
5	2	4	2.	4	1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BPKPA D	4	Laporan	175.000.000	DAU	SDG's	4	Laporan	175.000.000
5	2	4	2.	4	1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPA D	4	Laporan	35.000.000	DAU	SDG's	4	Laporan	35.000.000
5	2	4	2.	4	1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BPKPA D	500	Objek Pajak	100.000.000	DAU		500	Objek Pajak	100.000.000
5	2	4	2.	4	1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BPKPA D	2	Dok	35.000.000	DAU		2	Dok	35.000.000
5	2	4	2.	4	1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPA D	1	Layanan	37.000.000	DAU		1	Layanan	37.000.000
5	2	4	2.	4	1	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BPKPA D	4	Dok	35.000.000	DAU		4	Dok	35.000.000
5	2	4	2.	4	1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BPKPA D	12	Dok	110.000.000	DAU		12	Dok	110.000.000
5	2	4	2.	4	1	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPA D	4	Dok	45.000.000	DAU		4	Dok	45.000.000
5	2	4	2.	4	1	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian	BPKPA D	4	Dok	66.000.000	DAU		4	Dok	66.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Nias Selatan.

Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu alat perencanaan yang merupakan alat perencana termanajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, Renja sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Telukdalam, 29 Juli 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Nias Selatan,


AFERILI HARITA, SE., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 200502 1 001